

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN :
IDENTIFIKASI PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PROGRAM DI DESA
LINGGASARI KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS
*IMPLEMENTATION OF THE SUBDISTRICT DEVELOPMENT PROGRAM:
IDENTIFYING BENEFICIARIES' PERCEPTION ON THE PROGRAM IN
VILLAGE OF LINGGASARI, SUBDISTRICT OF KEMBARAN,
BANYUMAS REGENCY***

Oleh :

Sukarso

Jurusan Ilmu administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNSOED

(Diterima : 2 April 2003, disetujui : 9 April 2003)

ABSTRAK

Fenomena ketidak-berdayaan masyarakat tampak jelas kita lihat tetapi perlakuan terhadap fenomena tersebut tampaknya tidak jelas. Di satu pihak, selama ini terdapat banyak program yang dikatakan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat tetapi di lain pihak, masih banyak sekali kaum papa yang hidup dalam lingkaran kemiskinan, bahkan terus bertambah jumlahnya. Tidak ditemui adanya hasil evaluasi yang menyeluruh mengenai bagaimana proses pemberdayaan ini berjalan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi persepsi masyarakat tentang Program Pengembangan Kecamatan, sebagai satu program yang mengklaim sebagai program pemberdayaan masyarakat, Hasilnya, mereka cenderung menilai program yang mereka terima bersitat ekonomis, cukup berhasil, namun pemerintah adalah instansi yang paling berwenang untuk membuat program dan masyarakat sebaliknya sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat cenderung tidak berdaya dalam proses pelaksanaan program. Oleh karena itu, implikasinya adalah peran pemerintah cukup sebagai fasilitator saja, sementara masyarakat harus dibuat lebih aktif sehingga dapat secara nyata memiliki program. Konsekuensinya, institusi asli lokal harus direvitalisasi sehingga mereka dapat mendesain program yang mereka butuhkan bagi pemberdayaan mereka.

Kata kunci : persepsi tentang program; program pemherdayaan.

ABSTRACT

The phenomenon of people powerlessness is obvious but the treatment and effort to solve it are not. In one hand, many programs hitherto are stated to be aimed at empowering the people. On the other hand, however, many people still live in poverty, their number is even increasing over time. Result of comprehensive assessment on the progress of the empowerment process is not available. Thus, the research on which this article was based was aimed at identifying the people' s perception on the Subdistrict Development Program as one of the programs claiming to be a people empowerment program. The research found that people tend to consider that the program they were involved in was economic in nature. that it was fairly a success, and that the government is the only institution having the authority to make and implement a program; people tend to be powerless in the implementation

indigenous local institutions should be revitalized so as to make them able to design the program needed for their empowerment.

Key words: perception on the program; empowerment program.

PENDAHULUAN

Paradigma pembangunan yang berorientasi pada manusia menurut Korten (1984) bercirikan nilai-nilai yang berfokus pada manusia sebagai subjek pembangunan. Pada hakekatnya paradigma ini yang mendasari apa yang pada dasawarsa terakhir ini di Indonesia dikenal dengan “pemberdayaan masyarakat”. Hampir semua dokumen program pembangunan yang ada di Indonesia tidak lupa mencantumkan tujuannya sebagai “pemberdayaan masyarakat”.

Proyek Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (K-PEL) BAPPENAS mengidentifikasi pendekatan konsepsi berbagai program yang dinyatakan sebagai program pemberdayaan selama ini ternyata sebagian besar program berorientasi pada pendekatan pragmatis dan ekonomis (Lampiran 1). Dari hasil identifikasi tersebut, ternyata berbagai program yang ada dibangun dengan konsep yang tidak matang. Hal ini tampak dari statuta program yang tidak mempunyai draft akademik sehingga terkesan seadanya, dari latar belakang masalah sampai pada kriteria evaluasinya.

Sementara itu, di Kabupaten Banyumas, sebagai satu dari lebih 360 kabupaten di Indonesia, pada tahun 2000 jumlah program

nasional yang dilaksanakan sebanyak 32 program (Lampiran 2). Dari jumlah program yang sebanyak itu, ternyata tidak ditemui koordinasi yang terkonsep dalam pelaksanaannya.

Dari kelemahan statuta berbagai program tersebut, menarik untuk dikaji mengenai bagaimana persepsi masyarakat sendiri tentang program tersebut. Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji adalah : persepsi masyarakat tentang bermacam program yang ada di Banyumas. Karena fokus kajian ini terlalu luas, maka peneliti membatasi research question pada bagaimana persepsi masyarakat tentang **Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang diterimanya**. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi persepsi masyarakat tentang program pengembangan kecamatan, meliputi persepsi tentang output program, tentang pelaksanaan program, tentang keberhasilan program, dan tentang kewenangan pemerintah vis-a-vis masyarakat dalam program pembangunan.

TINJAUAN PUSTAKA

Ada tiga konsep pemberdayaan masyarakat (Pranarka dan Vidyandika, 1996). Konsep pertama, pemberdayaan masyarakat hanya dilihat sebagai

memberikan bantuan seperti bantuan, modal atau subsidi. Program-program karitatif dan sinterklus termasuk dalam kategori ini. Kedua, pemberdayaan difokuskan pada upaya peningkatan kinerja operasi dengan membenahi pola kebijakan, peningkatan kualitas SDM, penguatan kelembagaan dan sebagainya. Ketiga, ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh struktur sosial, politik, budaya dan ekonomi. Dengan demikian, pemberdayaan harus dilakukan melalui transformasi struktural secara mendasar dengan merancang ulang struktur kehidupan yang ada. Karena sifat revolusionernya, maka konsep terakhir ini disebut juga sebagai *critical paradigm*.

Dalam pustaka lain, kebijakan publik secara sederhana adalah *whatever government choose to do or not to do* (Dye, 1980) sehingga apa pun yang menjadi keputusan pemerintah untuk melakukan *treatment* atau tindakan bagi kepentingan masyarakat adalah kebijakan publik, bahkan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan apa-apa pun termasuk kebijakan publik (*pasif*). Dengan demikian, segala program pembangunan, khususnya program pemberdayaan masyarakat, secara konseptual adalah kebijakan publik.

Proses kebijakan publik merupakan proses yang rumit dan seringkali tidak runtut karena tidak semua hal yang ada dalam proses tersebut eksplisit dan berurutan. Namun, ada tiga hal pokok yang dapat “diurutkan”, yaitu formulasi

kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Para ahli dalam bidang ini, misalnya Wildavsky (1984), Eugene Bardach (1980), Lindholm (1976), Marilee Grindle (1980), Weimer dan Vining (1999), Hill (1993), Dunn (2000) dan Ripley (1986) menyiratkan bahwa meskipun tidak teratur berurutan dan tidak dapat dipisahkan, dapat dibedakan tiga hal dalam proses kebijakan publik. Ketiga hal itu adalah perumusan atau formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Mengenai evaluasi, ternyata banyak sekali pengertian yang relatif berbeda. Wildavsky (1984), membedakan evaluasi dalam lima pertanyaan pokok; *when ?*, *where ?*, *for whom ?*, *what ?*, dan *why ?* Salah satu jenis evaluasi untuk menjawab apa (*what*) yang akan dievaluasi adalah apa yang oleh Dunn disebut *decision-theoretic evaluation*. Evaluasi jenis ini ingin *m e m b e - r i k a n d e s k r i p s i* pelaksanaan program dengan menentukan kriteria sendiri secara teori apa yang akan dievaluasi dengan asumsi bahwa substansi tersebut merupakan tujuan riil program dari para stakeholder yang tidak dinyatakan secara eksplisit.

Dalam hal menentukan sasaran evaluasi dalam proses implementasi kebijakan, Mazmanian dan Sabatier (1983) melihat ada tiga perspektif: pertama, perspektif elite, melihat bagaimana kebijakan awal diinterpretasikan untuk dapat dilaksanakan oleh birokrasi tingkat

dengan kelompok sasaran kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dan ketiga, perspektif kelompok sasaran, melihat bagaimana kelompok sasaran (beneficiaries) tersebut menerima dan memanfaatkan kebijakan tersebut.

Sementara itu, Korten (1984) menjelaskan bagaimana berbagai program pembangunan dapat berhasil dalam fit model yang populer itu. Dari model “segitiga” ini, penerima program “berhadapan” dengan organisasi pelaksana dan program itu sendiri. Dengan organisasi pelaksana, beneficiaries mendapatkan pelayanan (jika syarat untuk mendapatkan pelayanan program dapat dipenuhi), dengan program, beneficiaries mendapat output program dan pemanfaatannya. Dengan demikian, dari perspektif kelompok sasaran atau beneficiaries, kinerja dan atribut suatu program dapat dikenali dari persepsi mereka tentang pelaksanaan program dan tentang program yang mereka terima.

Dari uraian konsepsi tersebut, maka penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dalam tulisan ini terdiri atas : persepsi kelompok sasaran tentang output kebijakan, tentang pelaksanaan kebijakan, tentang keberhasilan kebijakan, dan tentang perlunya program baru, serta persepsi mereka tentang kewenangan stakeholders.

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan asumsi unit analisis berbagai variabel penelitian pada level individu. Masing-masing individu (responden) mewakili dirinya sendiri sehingga pencacahan bagi mereka lebih tepat.
2. Lokasi Penelitian. Penelitian ini berlokasi di Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Lokasi ini dipilih secara acak dari 8 desa yang mendapatkan alokasi dana PPK Tahun 2001 untuk Kecamatan Kembaran.
3. Sasaran Penelitian. Untuk sasaran program, secara acak program terpilih adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Untuk obyek penelitian ini : (1) Dokumen laporan pelaksanaan PPK; (2) Pelaksana PPK; dan (3) Kelompok Sasaran PPK di lokasi penelitian.
4. Metode Sampling. (a) dokumen diambil secara purposif yang relevan dengan tujuan penelitian; (b) sasaran Pelaksana, semua petugas PPK menjadi sampel penelitian (4 responden); dan (c) sasaran Masyarakat, digunakan random accidental sampling, yaitu mengambil sampel berdasarkan yang ditemui sampai jumlah tertentu (56 responden).
5. Metode Pengumpulan Data. (a) Daftar pertanyaan tertutup digunakan untuk “mengukur” variabel-variabel penelitian

6. Variabel Penelitian.

- a. Persepsi tentang output Program PPK, yaitu pengetahuan dan penilaian masyarakat tentang apa yang diberikan Program Pengembangan Kecamatan kepada kelompok sasarannya, dibedakan antara output yang bersifat ekonomi, non-ekonomi, dan campuran.
- b. Persepsi tentang Pelaksanaan Program PPK, yaitu pengetahuan dan penilaian masyarakat tentang proses pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan, dibedakan antara pragmatis, reformatif, dan revolutif.
- c. Persepsi tentang Keberhasilan Program PPK, yaitu pengetahuan dan penilaian masyarakat tentang kinerja pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan, dibedakan antara berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.
- d. Persepsi tentang Perlunya Program Baru, yaitu pengetahuan dan penilaian masyarakat tentang perlunya program baru sebagai pengganti Program Pengembangan Kecamatan, dibedakan antara perlu program baru, PPK diperbaiki, atau melanjutkan PPK yang ada.
- e. Persepsi tentang Kewenangan Pemerintah, yaitu pengetahuan dan penilaian masyarakat tentang besarnya kewenangan

pemerintah di dalam membuat dan melaksanakan program-program pembangunan, dibedakan antara kewenangan mutlak pemerintah, kewenangan pemerintah dan masyarakat, dan kewenangan masyarakat sendiri.

7. Teknik Analisis Data.

Analisis data dalam studi ini dilakukan secara deskriptif (kualitatif dan kuantitatif) serta interaksionis, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (diadaptasi dari model interaktif Miles dan Hubermans, 1984: 20).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Ringkas Lokasi Penelitian

1. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Kembaran

Program PPK di Kecamatan Kembaran pada Tahun 2000/2001 didistribusikan bagi delapan desa. Dengan dana sejumlah satu milyar rupiah, masing-masing desa mendapatkan rata-rata Rp. 125.000.000,00. (seratus duapuluh lima juta rupiah). Penggunaan dana Program PPK ini secara garis besar dibedakan dalam dua jenis kegiatan Sarana/Prasarana dan Modal Usaha (Surat Penetapan Camat Kembaran No. 414.2/1113/X/2000).

2. Desa Linggasari

Desa ini adalah satu dari enambelas desa yang ada di

ini sekitar 9 kilometer dari ibukota kabupaten.

Desa Lingasari pada tahun 2001 mendapatkan alokasi dana PPK sebesar Rp 125.000.000,00. (seratus duapuluh lima juta rupiah). Dana ini digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana Rp 75.000.000,00 dan modal usaha Rp 50.000.000,00. Untuk modal usaha, PPK telah mengalirkan dana kepada 96 orang dari 1.292 kepala keluarga yang ada (sekitar 8%). Rata-rata alokasi dana untuk modal usaha per orang (kepala keluarga) Rp 125.000,00.

B. Deskripsi Variabel Penelitian

1. Persepsi Masyarakat tentang output Program PPK

Hasil identifikasi persepsi kelompok sasaran dan pelaksana program tentang output PPK di

Desa Lingasari dapat diperiksa pada Tabel 1 berikut ini :

Dari data persepsi masyarakat tentang output program, tampak bahwa masyarakat cenderung melihat program yang mereka terima lebih bersifat ekonomi. Hal ini dapat dipahami mengingat di lokasi penelitian (dan kemungkinan besar di tempat lain) alokasi dana program 40 persennya digunakan untuk modal usaha (simpan pinjam) sementara yang 60 persennya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana. Responden lebih merasakan output PPK sebagai simpan pinjam daripada yang lainnya.

2. Persepsi Masyarakat tentang pelaksanaan Program PPK

Persepsi masyarakat tentang pelaksanaan PPK dapat

Tabel 1. Persepsi tentang Output Program PPK

Responden	Persepsi tentang Pendekatan Program			Keterangan
	Ekonomi	Campuran	Non-Ekonomis	
Kelompok Sasaran	190 (42%)	178 (40%)	80 (18%)	56 responden
Petugas / Pelaksana	3 (9%)	19 (60%)	10 (31%)	4 responden
Jumlah	193 (40%)	197 (41%)	90 (19%)	60 responden

Sumber : Data lapangan diolah

Keterangan : Skor dihitung dari 8 pertanyaan

Tabel 2. Persepsi tentang Pelaksanaan Program PPK

Responden	Persepsi tentang Pelaksanaan Program			Keterangan
	Pragmatis	Reformatif	Revolutif	
Kelompok Sasaran	404 (33%)	477 (39%)	351 (29%)	56 responden
Petugas / Pelaksana	19 (22%)	39 (44%)	30 (34%)	4 responden
Jumlah	423 (32%)	516 (39%)	381 (29%)	60 responden

Sumber : Data lapangan diolah

Keterangan : Skor dihitung dari 22 pertanyaan

Sebagian masyarakat (39%) ternyata melihat bahwa pelaksanaan Program PPK sudah melibatkan mereka lebih banyak. Meskipun demikian, 33% responden melihat bahwa Program PPK bersifat pragmatis, bahwa program tersebut dilaksanakan oleh pelaksana sementara masyarakat hanya menerima saja. Sisanya, 29% responden, melihat bahwa pelaksanaan program tersebut ditentukan sepenuhnya oleh penerima program.

3. Persepsi Masyarakat tentang keberhasilan Program PPK
Persepsi masyarakat tentang keberhasilan Program PPK dapat

diperiksa pada Tabel 3 berikut ini :

Dari persepsi responden tentang keberhasilan program ini, ternyata sebagian besar (43%) responden masyarakat melihat program sudah cukup berhasil. Keberhasilan program ini terutama dilihat dari pencapaian tujuan program menurut responden. Data ini dapat dimaknai bahwa eksistensi program PPK memang cukup berhasil menurut versi kelompok sasaran. Meskipun demikian, data ini perlu didiskusikan dengan data persepsi responden tentang perlunya program baru di pembahasan berikut ini.

Tabel 3. Identifikasi Persepsi Masyarakat tentang Keberhasilan Program PPK

Responden	Persepsi tentang Keberhasilan PPK			Keterangan
	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil	
Kelompok Sasaran	222 (40%)	244 (43%)	94 (17%)	56 responden
Petugas / Pelaksana	20 (50%)	15 (37,5%)	5 (12,5%)	4 responden
Jumlah	242 (40%)	259 (43%)	99 (17%)	60 responden

Sumber : Data lapangan diolah

Keterangan : Skor dihitung dari 10 pertanyaan

Tabel 4. Persepsi tentang Perlunya Program Pemberdayaan Baru

Responden	Persepsi tentang Perlunya Program Baru			Keterangan
	Perlu	Yang Ada Diperbaiki	Tidak Perlu	
Kelompok Sasaran	111 (40%)	122 (43%)	47 (17%)	56 responden
Petugas / Pelaksana	8 (40%)	8 (40%)	4 (20%)	4 responden
Jumlah	119	130	51	60 responden

Sumber : Data lapangan diolah

Keterangan : Skor dihitung dari 5 pertanyaan

Sebagian besar (43%) berpendapat bahwa sebaiknya program yang sudah ada perlu diperbaiki, ini menunjukkan sebenarnya Program PPK masih harus diperbaiki, apalagi yang berpendapat bahwa perlu program baru sama sekali mencapai 40%, imbang dengan yang berpendapat perlu memperbaiki program. Meskipun PPK dianggap cukup berhasil, tetapi masih perlu diperbaiki atau membuat program yang baru sama sekali.

5. Persepsi Masyarakat tentang Kewenangan Pemerintah dalam Pembangunan

Besarnya kewenangan Pemerintah dapat diperiksa pada Tabel 5 berikut ini :

Persepsi masyarakat tentang besarnya kewenangan pemerintah ini merupakan manifestasi dari pola sentralistis dalam perumusan dan pengelolaan berbagai program pembangunan selama ini. Memang banyak program yang menyatakan diri sebagai program pemberdayaan masyarakat tetapi dimulai dalam setting dengan masyarakat berada pada posisi tidak berdaya. Paradok ini menjadikan upaya pemberdayaan masyarakat tidak mungkin,

Tabel 5. Persepsi Masyarakat tentang Kewenangan Pemerintah dalam Pembangunan

No.	Pertanyaan	Skor Skala			Jawaban					
		KS.	Pel.	Ttl.	Bebas		Agak bebas		Tidak bebas	
					KS./%	Pel./%	KS./%	Pel./%	KS./%	Pel./%
1.	Pemerintah bebas merencanakan program PPK? (2 pertanyaan)	112	8	120	75/66	6/75	30/27	2/25	7/7	0/0
2.	Pemerintah bebas membiayai program PPK? (3 pertanyaan)	168	12	180	101/60	10/83	50/30	2/17	17/10	0/0
3.	Pemerintah bebas melaksanakan program PPK? (4 pertanyaan)	224	16	240	172/77	10/63	42/19	6/37	10/4	0/0
4.	Pemerintah bebas mengevaluasi program PPK? (1 pertanyaan)	56	4	60	47/84	4/100	6/11	0/0	3/5	0/0
	Jumlah	560	40	600	395/70	30/75	128/23	10/25	37/7	0/0

Sumber : Data primer diolah.

Keterangan : Pel. = pelaksana (4 responden); KS = kelompok sasaran (56 responden).

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PPK di Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, lebih bersifat ekonomis dan banyak masyarakat melihat program PPK merupakan program yang mendudukkan masyarakat sebagai penerima, bukan pemilik program. Meskipun sebagian masyarakat menganggap program PPK sudah cukup berhasil, namun mereka cenderung menganggap bahwa Program PPK perlu memperbaiki kinerjanya atau bahkan perlu membuat program yang sama sekali baru. Pemerintahlah yang berhak untuk itu, sementara masyarakat selama ini menganggap tidak berhak untuk itu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat powerless ketika berhadapan vis-a-vis dengan pemerintah.

Implikasinya, Posisi pemerintah sebagai fasilitator merupakan pilihan yang paling masuk akal. Dengan demikian, perumusan paket program/kebijakan yang secara nyata memposisikan masyarakat sebagai pemilik program adalah langkah yang paling memungkinkan untuk pemberdayaan masyarakat. Pendekatan sentralistis dan monopolistis pemerintah tidak lagi relevan karena indigenous local merupakan starting point untuk pemberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, lembaga-lembaga asli lokal merupakan lembaga yang harus di-revitalized terlebih dahulu.

Sinyalemen lemahnya atau bahkan hancurnya lembaga kemasyarakatan lokal perlu dikaji secara mendalam. Perlu dibuat assessment apakah lembaga-lembaga lokal masih ada dan berfungsi atau mungkin sudah tergantikan. Oleh karena itu, identifikasi dan revitalisasi lembaga-lembaga lokal merupakan langkah awal untuk memungkinkan masyarakat lokal merumuskan program pemberdayaan bagi mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bardach, E. 1980. *Implementation as Political Game*. Prentice-Hall, New Jersey.
- Dunn, W.N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dye, T.R. 1980. *Introduction to Public Policy*. McGraw-Hill, Toronto.
- Grindle, Marilee 1980, *Implementation*, Pricetone University Press, Ney Jersey.
- Hill, M. 1993. *The Policy Process: A Reader*. Harvester Wheatsheaf, A Division of Simon & Schuster International Group, Hertfordshire.
- Korten, D.C. 1984. *Bureaucracy and The Poor*. Kumarian Press, New Delhi.
- Lindholm, C. 1976. *Study Public Policy*. Prentice-Hall, New Jersey.
- Mazmanian, D.A. and P.A. Sabatier, 1983. *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman and Company, Glenview, Illinois.
- Pranarka, A.M.W. dan V. Tjokrowinoto. 1996. *Pemberdayaan : Konsep*,

- Prijono, O.S. dan A.M.W. Pranarka (Eds.) 1996. Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS, Jakarta.
- Ripley, R.B. and G.A. Franklin. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy. The Dorsey Press, Chicago.
- Tjokrowinoto, M. 1995. Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Weimer, D.L. And A.R. Vining. 1999. Policy Analysis: Concepts And Practice. Third Edition, Prentice-Hall, Inc., New Jersey.
- Wildavsky, A. and Freeman. 1984. Implementation. Prentice-Hall, New Jersey.
- World Bank. 1998. Economic Growth and Equity. Word Bank Report.

Lampiran 1. Hasil Identifikasi Pendekatan Konseptual dalam Program Pemberdayaan
(Approach Identified of the Community Empowerment Programs)

No. Urut	No. Prog.	Nama Program	Pendekatan	
			Masalah/ Materiil	Aksi (<i>treatment</i>)
1.	1.	P3DT	Ekonomis	Pragmatis
2.	2.	Jaring Pengaman Sosial (JPS)	Ekonomis	Pragmatis
3.	2.1.	JPS Ketahanan Pangan (JPS-KP)	Ekonomis	Pragmatis
4.	2.1.1.	Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras	Ekonomis	Pragmatis
5.	2.1.2.	Pengembangan pembibitan dan budidaya ayam buras di pedesaan	Ekonomis	Pragmatis
6.	2.1.3.	Pengembangan tambak rakyat (<i>Rehabilitation of brackishwater shrimp culture infrastructure</i>)	Ekonomis	Pragmatis
7.	2.2.1.	Program Beasiswa dan DBO Pendidikan Dasar dan Menengah	Non-Ekonomis	Pragmatis
8.	2.2.2.	Program Beasiswa dan DBO Pendidikan Tinggi	Non-Ekonomis	Pragmatis
9.	2.2.3.	Dana Operasional Dan Pemeliharaan (DOP) SD/MIProgram Beasiswa dan DBO Pendidikan Tinggi	Non-Ekonomis	Pragmatis
10.	2.3.1.	Bidang Kesehatan (JPS-BK)	Campuran	Pragmatis
11.	2.3.2.	Bidang Sosial (JPS-BS)	Campuran	Pragmatis
12.	2.3.3.	Program Makanan Tambh. Anak Sekolah (PMT-AS)	Campuran	Pragmatis
13.	2.4.	JPS Bidang Penciptaan Lapangan Kerja (JPS-PLK): Program Prakarsa Khusus Bagi Penganggur Perempuan (PKPP)	Ekonomis	Pragmatis
14.	2.5.	JPS Bidang Penciptaan Lapangan Kerja (JPS-PLK): Program Padat Karya Perkotaan (PKP)	Ekonomis	Pragmatis
15.	2.6.	JPS Bidang Pemberdayaan Masyarakat (JPS "PDM-DKE")	Ekonomis	Pragmatis
16.	3.	Prokesra (Program Pembangunan Keluarga Sejahtera)	Campuran	Pragmatis
17.	3.1.	Takesra (Tabungan Keluarga Sejahtera)	Ekonomis	Pragmatis
18.	3.2.	Kukesra (Kredit Usaha Keluarga Sejahtera)	Ekonomis	Pragmatis
19.	3.3.	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Ekonomis	Pragmatis
20.	3.4.	Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdutaskin)	Campuran	Reformatif
21.	3.5.	Pengembangan Model Kemitraan Usaha di Bidang Agribisnis (Prokesra)	Ekonomis	Reformatif
22.	3.6.	Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (Prokesra)	Ekonomis	Reformatif
23.	3.7.	Bina Keluarga Muda Mandiri (Prokesra)	Campuran	Reformatif
24.	3.8.	Kegiatan Pembinaan Kualitas Anak (Prokesra)	Non-Ekonomis	Reformatif
25.	3.9.	Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga	Campuran	Pragmatis
26.	4.	Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	Campuran	Pragmatis
27.	5.	Bantuan Peningkatan Peranserta Masyarakat (BP2M)	Ekonomis	Pragmatis
28.	6.	Proyek Pembinaan dan Pengembangan Petani-Nelayan Kecil (P4K)	Ekonomis	Pragmatis
29.	7.	Proyek Pemberdayaan Petani dan Agribisnis di Pedesaan	Ekonomis	Pragmatis
30.	8.	Program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal	Ekonomis	Pragmatis
31.	9.	Proyek Pengembangan Ketahanan Pangan	Ekonomis	Pragmatis
32.	10.	Kredit Usaha Mandiri (KUM)	Ekonomis	Pragmatis

Sumber : Adaptasi Laporan Analisis Program Pemberdayaan, K-PEL Bappenas 2001.

Keterangan : E = ekonomis; C = campuran; N-E= Non-ekonomis; P = pragmatis; Rf = reformatif; Rv = revolutif

Lampiran 2. Program-program Pemberdayaan Menurut Institusi Perencana dan Pelaksana Di Kabupaten Banyumas Tahun 2002

No. Urut	No. Prog	Nama Program	Institusi Perencana	Institusi Pelaksana
1.	1.	P3DT	Bappenas	Depdagri,
2.	2.	Jaring Pengaman Sosial (JPS)	Bappenas	Instansi Terkait
3.	2.1.	JPS Ketahanan Pangan (JPS-KP)	Bappenas	Instansi Terkait
4.	2.1.1	Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras	Bappenas	Bulog, Depdagri, PEMDA
5.	2.1.2	Pengembangan Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras di Pedesaan	Bappenas	Departemen Pertanian
6.	2.1.3	Pengembangan tambak rakyat (<i>Rehabilitation of brackishwater shrimp culture infrastructure</i>)	Bappenas	Departemen Pertanian
7.	2.2.1	Program Beasiswa dan DBO Pendidikan Dasar dan Menengah	Bappenas	Depdiknas, PEMDA
8.	2.2.2	Program Beasiswa dan DBO Pendidikan Tinggi	Bappenas	Depdiknas, PEMDA
9.	2.2.3	Dana Operasional Dan Pemeliharaan (DOP) SD/MI Program Beasiswa dan DBO Pendidikan Tinggi	Bappenas	Depdiknas, Depdagri, Depag
10.	2.3.1	Bidang Kesehatan (JPS-BK)	Bappenas	Depkes, PEMDA
11.	2.3.2	Bidang Sosial (JPS-BS)	Bappenas	Depdagri, Depdiknas
12.	2.3.3	Program Makanan Tambh. Anak Sekolah (PMT-AS)	Bappenas	Depdagri, Depdiknas, Depag, Deptan
13.	2.4.	JPS Bidang Penciptaan Lapangan Kerja (JPS-PLK): Program Prakarsa Khusus Bagi Penganggur Perempuan (PKPP)	Bappenas	Depkimpraswil
14.	2.5.	JPS Bidang Penciptaan Lapangan Kerja (JPS-PLK): Program Padat Karya Perkotaan (PKP)	Bappenas	Depkimpraswil
15.	2.6.	JPS Bidang Pemberdayaan Masyarakat (JPS "PDM-DKE")*)	Bappenas	Depdagri
16.	3.	Prokesra (Program Pembangunan Keluarga Sejahtera)	BKKBN	BKKBN, PEMDA
17.	3.1.	Takesra (Tabungan Keluarga Sejahtera)	Bappenas	PEMDA
18.	3.2.	Kukesra (Kredit Usaha Keluarga Sejahtera)	BKKBN	BKKBN
19.	3.3.	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	BKKBN	BKKBN
20.	3.4.	Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdutaskin)	Bappenas, Meneg. Kesrataskin	Departemen Teknis Terkait
21.	3.5.	Pengembangan Model Kemitraan Usaha di Bidang Agribisnis (Prokesra)	Bappenas, Meneg. KesraTaskin	Menegkesra-Taskin, Departemen Terkait
22.	3.6.	Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha	BKKBN	BKKBN, Depkop-PKM
23.	3.7.	Bina Keluarga Muda Mandiri (Prokesra)	BKKBN	BKKBN
24.	3.8.	Kegiatan Pembinaan Kualitas Anak	BKKBN	BKKBN
25.	3.9.	Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga	Depdagri, Otda	Depdagri dan Otda
26.	4.	Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	Bappenas	Depdagri
27.	5.	Bantuan Peningkatan Peranserta Masyarakat (BP2M)	Bappenas	Depdagri
28.	6.	Proyek Pembinaan dan Pengembangan Petani-Nelayan Kecil (P4K)	Departemen Pertanian	Departemen pertanian
29.	7.	Proyek Pemberdayaan Petani dan Agribisnis di Pedesaan	Departemen Pertanian	Departemen Pertanian
30.	8.	Program Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal	Bappenas	Deperindag
31.	9.	Proyek Pengembangan Ketahanan Pangan	Bappenas	Departemen Pertanian
32.	10.	Kredit Usaha Mandiri (KUM)	Departemen Pertanian	Departemen Pertanian

Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas 2002, Adaptasi Laporan Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat, K-PEL Bappenas 2001